

## **Genealogi Pemikiran Islam Liberal dan Pemikiran Soekarno: Nasionalisme, Demokrasi, dan Pluralisme.**

Haryo Ksatrio Utomo

### **Abstrak**

Artikel ini menguraikan mengenai diskursus pemikiran Islam Liberal yang berkembang dalam dunia Islam dan di Indonesia secara khusus dari pemikiran Sukarno. Artikel ini berargumen bahwa Sukarno termasuk pemikir Islam Liberal yang memadukan filosofi liberal dengan Islam di Indonesia. Sukarno yakin bahwa sekulerisme dan demokrasi merupakan syarat kemajuan dari Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi, Islam Liberal, Sukarno

### **Latar Belakang.**

Islam liberal lahir sebagai gerakan politik hadir untuk merespon perubahan geopolitik dan sosial politik yang terjadi di dunia pasca kekalahan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Kejatuhan Soviet menyebabkan Islam secara khusus menjadi perhatian dari Barat, dan kecurigaan terhadap umat Islam pun terjadi. Kecurigaan menyebabkan kalangan muslim menempuh respon berbeda, mulai dari berusaha membangkitkan nilai-nilai Islam yang tidak menerima sama sekali terhadap ide Barat, menerima sebagian gagasan Barat dengan pendekatan modernitas, hingga menerima keseluruhan ide Barat dengan mengomparasikan referensi awal dari kitab klasik ulama Islam dengan filsafat Liberal yang berkaitan dengan ide demokrasi, pluralisme, dan nasionalisme.

Spektrum terakhir pemikiran Islam, yaitu Islam liberal secara genealogis menerima gagasan liberalisme yang berakar dari dua pemikiran John Locke. Pertama, John Locke berpendapat bahwa setiap manusia memiliki hak-hak alamiah, yaitu hak-hak setiap individu yang melekat dengan setiap individu sejak masa kelahiran di dunia dan merupakan pemberian dari Tuhan. Hak-hak alamiah tersebut terdiri dari hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk properti atau kesehatan. Hak-hak alamiah

tersebut pada masa kontemporer menjadi fondasi hak asasi manusia. Kedua, kekuasaan negara harus dibatasi oleh perjanjian antarsesama manusia dengan satu tujuan, yaitu untuk mencegah pengabaian hak-hak alamiah oleh negara. Pembatasan kekuasaan negara dilakukan dengan cara pemecahan satu organ kekuasaan menjadi tiga institusi kekuasaan. Gagasan pengakuan hak alamiah dan pembatasan kekuasaan negara menjadi fondasi pemerintahan atas dasar kebebasan yang berwujud dalam sistem demokrasi.

Gagasan Locke berkembang menjadi ide hak asasi manusia yang kompleks. Kompleksitas gagasan pasca Locke terjadi saat ide hak-hak alamiah mengakui hak-hak. Gagasan pasca Locke mulai mengakui keberadaan hak sosial, ekonomi, dan politik yang tidak hanya berlaku bagi individu, melainkan juga komunitas, kelompok, dan masyarakat. Kemudian, pengakuan hak asasi manusia juga berkembang dari pengakuan hak bagi mayoritas, namun itu juga mulai mengakui hak minoritas yang secara narasi politik pada fase awal tidak menjadi perhatian secara khusus. Pengakuan hak minoritas sebagai narasi politik kontemporer mewujud dalam bentuk pengakuan hak-hak alamiah mulai dari hak anak-anak, hak perempuan, hingga hak LGBT. Perluasan sasaran hak-hak manusia menyebabkan gagasan hak-hak alamiah dari Locke semakin berkembang secara kompleks.

Kemudian, perluasan konsep hak-hak alamiah bagi individu, komunitas, dan masyarakat yang berbeda dan minoritas mendorong penguatan demokrasi berbasis pluralisme. Pluralisme merupakan konsep politik yang menekankan pengakuan hak-hak banyak grup berbeda untuk saling bersaing satu sama lain. Pengakuan tersebut memberikan peluang yang sama bagi banyak kelompok berbeda untuk memasuki sistem politik dengan saluran-saluran demokrasi beragam, mulai dari pemilihan umum, asosiasi-asosiasi sipil, grup-grup kepentingan, hingga demonstrasi. Ide pluralisme yang menempatkan grup-grup, kelompok-kelompok, dan komunitas-komunitas menjadi bagian penting dari demokrasi sebab itu mencegah kemungkinan pembentukan tirani mayoritas, yaitu tirani yang menempatkan mayoritas orang banyak sebagai penentu eksistensi kelompok atau grup atau individu minoritas. Ide pluralisme akan memperkuat sistem demokrasi.

Perbedaan keberhasilan ide demokrasi dan pluralisme dalam negara baru tergantung pada nilai atau budaya politik dominan. Budaya politik dalam negara baru bisa berasal dari nilai ras dominan, suku bangsa dominan, dan agama dominan. Poin agama menjadi sangat penting dalam konteks negara baru dalam kawasan Timur Tengah sebab itu menjadi simbol mayoritas. Pemahaman agama yang membentuk budaya politik memiliki respon berbeda, mulai dari penolakan penuh terhadap ide demokrasi, penerimaan parsial dengan mengombinasikan antara nilai Islam dan demokrasi untuk memperjuangkan ide Islam Politik, hingga menerima keseluruhan nilai-nilai demokrasi dengan menyakini bahwa nilai-nilai Islam secara substansif sejalan dengan demokrasi. Poin ketiga menjadi fokus utama dalam bagian-bagian berikut dari esai ini, dengan bagian awal berkaitan dengan analisa teoritis, bagian berikut kontekstualisasi Islam Liberal di Timur Tengah, dan bagian terakhir berkaitan ide Islam Liberal di Indonesia.

#### **Perumusan Masalah.**

Diskursus Islam liberal yang berkembang di dunia Islam merupakan hasil kompromi ide antara diskursus liberalisme dan Islam Klasik. Kondisi demikian menunjukkan ada upaya dari para pemikir Islam untuk mempertemukan kedua tradisi tersebut untuk menunjukkan bahwa Islam memang memiliki sisi liberal. Pemunculan ide liberal dari Islam dilakukan oleh para pemikir Islam melalui pengkajian terhadap literatur-literatur Islam untuk memahami dimensi kontekstual dari syariah, serta menyesuaikan ide-ide demokrasi atau liberalisme dengan konteks Islam. Penyesuaian tersebut juga bisa dilakukan dengan cara pendalaman khazanah Islam dengan pendekatan disiplin ilmu sosial yang beragam. Pendekatan sisi liberal dari Islam tidak menjadi proses yang mudah sebab itu menyebabkan konflik teoritis baik dengan sesama umat Islam maupun dengan Barat. Kondisi demikian menyebabkan pendekatan teoritis yang terbuka menjadi strategi resolusi konflik teoritis.

Resolusi teoritis menguatkan ide bahwa Islam liberal sebagai istilah gerakan politik memang hadir sejak kekalahan Soviet dalam diskursus politik kontemporer, namun Islam liberal bagi para pemikir Islam secara historis sudah muncul sejak masa sebelum hegemoni Barat. Para pengkaji diskursus pemikiran Islam menyakini bahwa

genealogi pemikiran Islam liberal sudah muncul sejak masa awal peradaban Islam muncul di Timur Tengah. Pemaparan genealogi demikian bertujuan untuk menunjukkan orisinalitas ide Islam liberal dalam pemikiran Islam. Pemaparan demikian juga memungkinkan untuk menunjukkan bahwa ide liberal dalam Islam sudah muncul bahkan sebelum tradisi liberal tersebut mulai berkembang di Eropa. Genealogis tersebut berkembang dalam masyarakat Islam di Timur Tengah yang kemudian berkembang ke seluruh dunia dan itu mengalami proses lokalisasi seperti yang terjadi di Nusantara atau Indonesia.

Lokalisasi gagasan Islam liberal di Indonesia telah muncul sejak masa pemerintahan Hindia Barat yang terus berlanjut hingga masa sekarang. Gagasan Islam liberal pada masa Hindia Barat berakar pada pemikiran Soekarno yang mengedepankan gagasan nasionalisme dari Timur sebagai wujud penolakan Bung Karno terhadap negara Islam. Gagasan Islam liberal pada masa kontemporer berakar pada lokalisasi oleh pemikir Indonesia terhadap wacana sisi liberal Islam dari Fazlue Rahman yang kemudian berkembang di Indonesia.

Uraian di atas memunculkan dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimanakah genealogi dari pemikiran Islam Liberal sebagai proses kompromi terhadap gagasan mengenai sisi liberal dari Islam yang berkembang dalam masyarakat Islam di dunia. Kedua, bagaimanakah wujud lokalisasi genealogis pemikiran Islam liberal di Indonesia yang terlihat dalam pemikiran Soekarno.

### **Kerangka Berpikir Islam Liberal.**

Kerangka Berpikir Islam liberal dalam makalah akan menggunakan dua analisa teoritis. Pertama, diskursus genealogis dari Nader Hashemi yang membahas mengenai latar historis pembentukan gagasan Islam Liberal untuk menengahi perdebatan antara ide liberal dengan Islam. Kedua, analisa genealogis dari Charles Kurzman yang mengedepankan gagasan bahwa Islam liberal secara substansif sudah ada sejak masa awal Islam.

#### **3.1. Genealogis pertengahan antara Islam dan Liberal dari Nader Hashemi.**

Pembahasan teoritik mengenai relasi antara Islam dan Liberal secara khusus menjadi perhatian dari Nader Hashemi. Nader Hashemi dalam pembahasan relasi

antara Islam dan Liberal mengajukan tiga argumen kunci. Pertama, demokrasi liberal menempatkan ide sekulerisme sebagai prinsip utama. Penggunaan ide sekulerisme menjadi problematika tersendiri sebab tradisi keagamaan Islam tidak secara langsung bersifat inheren dengan konsep demokrasi dan sekularisasi politik. Hashemi berpandangan bahwa penerimaan terhadap sekulerisme sangat ditentukan oleh konsensus yang menyatukan individu, komunitas dan masyarakat. Konsensus akan menentukan penerimaan umat Islam terhadap sekulerisme untuk mengatasi ketegangan antara nilai-nilai Islam dengan ide-ide demokrasi, dan ketegangan tersebut merupakan dampak dari upaya transformatif ide-ide Islam dengan tujuan penyesuaian dengan diskursus sekulerisme dalam ranah politik. Hashemi menyakini bahwa sekularisme harus tumbuh dari bawah, dari masyarakat sipil sendiri.<sup>1</sup>

Kedua, masyarakat Islam dengan Islam sebagai pembentuk identitas, bisa saja menuju demokrasi liberal, selama proses demokratisasi tidak menghindari keberadaan fakta bahwa Islam memang memiliki dimensi politik. Argumentasi Hashemi jelas menolak asumsi dari paradigma ilmu sosial bahwa ide Islam politik dan liberalisme sebagai basis demokrasi selalu dalam posisi bertentangan satu sama lain. Hashemi menolak gagasan bahwa penerapan demokrasi harus selalu bermakna memilih antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai sekulerisme sebagai sebuah antitesis, namun Hashemi menyakini bahwa pembangunan demokrasi liberal di negara Barat yang bersumber dari tradisi Anglo-Saxon justru tidak membangun narasi oposisi atau perlawanan yang ketat terhadap agama. Tradisi Anglo-Saxon meneruskan semangat tradisi Protestan yang kemudian berkembang menjadi etika politik Amerika Serikat. Tradisi Amerika Serikat memang memisahkan antara agama dan negara, namun negara juga mengadopsi prinsip egalitarian dari Protestan.<sup>2</sup>

Ketiga, Hashemi melihat bahwa reaksi penerimaan atau penolakan terhadap gagasan demokrasi sangat berkaitan erat dengan pemahaman keagamaan yang dominan dalam masyarakat Islam. Pemahaman juga berkaitan mengenai keyakinan

---

<sup>1</sup>Nader Hashemi, *Islam, Secularism, and Liberal Democracy Toward a Democratic Theory for Muslim Societies*, New York: Oxford University Press, 2008, hal. 1-2.

<sup>2</sup>Ibid, hal. 2.

untuk memilih nilai antara Islam dan liberal yang terpenting bagi masyarakat. Masyarakat juga harus memilih antara reformasi pemahaman keagamaan atau menerima total nilai-nilai demokrasi. Hashemi melihat bahwa perdebatan teoritikal perlu memperhatikan kondisi sosial dan politik masyarakat Islam, yaitu kondisi penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap demokrasi dan penerimaan negara atas keterbukaan budaya politik. Masyarakat dan negara yang terbuka atas gagasan demokrasi menjadi fondasi utama proses reformasi pemahaman keagamaan yang mengarah kepada demokratisasi. Kemudian, reinterpretasi keagamaan menjadi fondasi kelompok Islam yang berbeda untuk menerima ide-ide kedaulatan individu, pembatasan peran negara, hingga pengakuan hak minoritas (Hashemi 2009, 3).

Reinterpretasi pemahaman Islam menurut Hashemi menjadi sangat penting untuk merespon kondisi pasca kekalahan Uni Soviet dalam perang dingin. Perang dingin menempatkan Amerika Serikat dan sekutu sebagai pemenang perang ideologis dengan demokrasi liberal menjadi gagasan politik utama. Demokrasi liberal sebagai hegemoni Barat menyebar ke seluruh dunia tanpa hambatan yang berarti. Hambatan mendasar demokrasi dalam konstruksi Barat berasal dari peradaban Islam yang dalam opini elit dan masyarakat serta sebagian intelektual sangat dekat dengan fundamentalisme. Persepsi fundamentalisme terhadap Islam menurut Hashemi juga tidak terlepas dari kemunculan Revolusi Iran yang berhasil menjatuhkan kekuasaan Shah Iran yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Kejatuhan Shah Iran dan kemunculan pemimpin besar Iran Khomeini memunculkan gerakan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan sekutu, sehingga tidak semua masyarakat Islam di dunia menerima demokrasi. Relasi yang dinamis antara kompromi dan ketegangan antara Islam dan Barat semakin menguat pasca serangan teroris kepada Amerika Serikat tahun 2001.<sup>3</sup>

Penanganan ketegangan antara Islam dan liberal menurut Hashemi harus bermula dari rekonstruksi konseptualisasi antara agama dan demokrasi. Agama harus dipahami dalam dua wujud, yaitu agama sebagai perwujudan relasi antara manusia dengan Tuhan dan agama sebagai perwujudan etika sosial yang mewarnai pola

---

<sup>3</sup>Ibid, hal. 4.

interaksi antarmanusia yang berjenjang dari level individu, masyarakat, hingga negara. Islam sebagai agama memiliki keterpaduan antara dimensi ilahiah dan dimensi kemanusiaan, dan itu semua membentuk nilai Islam politik. Kemudian, demokrasi juga perlu dipahami sebagai proses pembentukan sistem poliarki berdasarkan kriteria tertentu, mulai dari kebebasan hak politik, kebebasan berpendapat, hingga pelaksanaan pemilu bebas. Sistem poliarki seharusnya bisa mengakomodir etika Islam politik melalui proses kompromi.<sup>4</sup>

Hashemi menyadari proses kompromi antara sekulerisme dan Islam bukan hal yang mudah sebab ada empat poin problematika. Pertama, sebagian masyarakat Islam melihat gagasan sekulerisme berkaitan erat dengan ide atheisme. Persepsi demikian memunculkan ketidakpercayaan terhadap ide sekulerisme yang memisahkan antara agama dan politik, sehingga ide sekulerisme bermakna upaya menghilangkan eksistensi Tuhan dalam politik. Kedua, sekulerisme identik dengan konstruksi sistem otoritarian yang menyertai proses kolonisasi dunia baru oleh Barat. Pemerintah kolonial saat mempertahankan negara jajahan juga membentuk sistem sosial baru yang memisahkan budaya agama dari politik. Ketiga, kebijakan luar negeri dari Barat yang cenderung kontradiksi antara nilai-nilai demokrasi dengan praktek kekerasan oleh negara terhadap negara berkembang. Terakhir, perdebatan mengenai paradigma keislaman yang otentik menyebabkan ketidakjelasan sikap umat Islam terhadap sekulerisme.<sup>5</sup>

Hashemi menyakini bahwa hubungan setara antara Islam dan demokrasi akan muncul dari proses dialog yang terbuka, dan itu terjadi dalam tradisi Katolik kontemporer. Tradisi Katolik Roma melalui Konvensi Kedua Vatikan yang menegaskan bahwa tradisi Katolik mengakui asas-asas demokrasi yang menempatkan kebebasan individu, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Pandangan Vatikan tersebut sekaligus mengakhiri persepsi negatif Gereja Katolik Roma yang muncul sepanjang abad ke-19 terhadap ketidaksucian prinsip-prinsip demokrasi dalam perspektif Katolik. Perubahan sikap tersebut bagi Hashemi

---

<sup>4</sup>Ibid, hal. 6 s.d. 7.

<sup>5</sup>Ibid, hal. 147.

menunjukkan bahwa faktor reinterpretasi ajaran keagamaan memang menjadi faktor terpenting dalam proses rekonsialisasi antara agama dan demokrasi. Kondisi rekonsialisasi antara Islam dan liberal mungkin tidak mudah sebab umat Islam tidak memiliki satu institusi keagamaan yang bersifat sentralistis (Hashemi 2009: 166).

Uraian Hashemi mengenai sekulerisme memang menunjukkan bahwa penerapan ide tersebut bukan hal yang mudah. Gagasan tersebut bukan hanya sebatas memisahkan negara dan agama, namun itu juga berkaitan dengan banyak faktor yang turut berpengaruh. Faktor-faktor berpengaruh terhadap sekulerisme beragam, mulai dari faktor kecurigaan terhadap sekulerisme sebagai produk kolonial, faktor reinterpretasi keagamaan yang belum mendukung sekulerisme, reformasi masyarakat yang bersifat elitis, hingga inkonsistensi elit yang menerima gagasan sekulerisme namun menolak ide demokrasi. Hashemi juga menawarkan ide bahwa relasi antara Islam dan liberal sangat mungkin memiliki sumber-sumber otentik dari Islam, dan pembahasan nilai Islami dari prinsip liberal menjadi fokus bahasan bagian selanjutnya.

Bagian berikut tulisan akan memaparkan mengenai dimensi originalitas Islam liberal. Dimensi originalitas yang menjadi analisa Charles Kurzman berusaha untuk menunjukkan bahwa ide-ide liberal dari Islam memang sudah berakar dari tradisi pemikiran Islam itu sendiri. Tradisi Islam dalam analisa Kurzman sudah memunculkan prinsip-prinsip liberal sejak masa awal pembentukan masyarakat Islam dengan pengutamaan prinsip-prinsip egalitarian dan penolakan terhadap kekuasaan yang absolut.

### **Analisa Charles Kurzman mengenai Originalitas Islam Liberal dari perspektif Islam.**

Kurzman berpandangan bahwa akar semangat pembebasan atau liberalisasi Islam tidak sepenuhnya berasal dari Barat, namun itu juga berasal dari para pemikir Islam itu sendiri. Akar liberalisme Islam bermula dari Syaikh Waliyullah dari India pada masa akhir kekuasaan Dinasti Mongol. Waliyullah menyakini bahwa rasionalitas merupakan inti dari kebebasan manusia. Rasionalitas manusia menempatkan posisi manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi daripada makhluk lain, termasuk makhluk ghaib, maka manusia tidak perlu melakukan ritual penghormatan terhadap makhluk

ghaib secara berlebihan, dan itu tidak bermakna bahwa Islam mengabaikan tradisi adat selama tidak mengabaikan rasionalitas. Pandangan senada dimunculkan oleh Muhamammad Baqir, Al Afghani, Ahmad Khan, al Qisimi, al Tahtawi, hingga Ahmad Surkati yang semua juga menolak taqlid, dan menyerukan modernisasi pemikiran Islam sesuai prinsip kebebasan berpendapat .<sup>6</sup>xviii-xxii

Kurzman melihat ada tiga jaringan institusi yang berpengaruh dalam penyebaran Islam liberal. Pertama, jaringan pendidikan Islam di Al Azhar, sekolah modern di Turki, dan sebagainya mulai didominasi oleh jaringan modernis dan liberal. Penguasaan institusi pendidikan memperkuat proses penyebaran Islam liberal di berbagai kawasan dunia mengingat sebagian besar lulusan lembaga tersebut kembali ke negara asal. Kedua, jaringan media turut menyebarkan gagasan reformasi dan liberalisasi Islam, seperti Al Manar, Qanun, dan sebagainya. Ketiga, jaringan Muhaammad Abduh turut memperluas penyebaran Islam Liberal. Muhammad Abduh termasuk tokoh progresif yang berusaha mempertemukan tradisi Islam dan liberal. Pemikiran Abduh menyebar ke seluruh dunia melalui jaringan murid dia, mulai dari Ahmad Khatib, Jalaludin Dahlan, hingga al Thalibi<sup>7</sup>.

Kemudian, Kurzman menyoroiti perbedaan generasi Islam masa awal dan pertengahan abad ke-20 dengan masa akhir abad ke-20. Generasi liberal tidak secara langsung menyatakan diri sebagai tokoh progresif sebab sebagian besar tokoh tersebut hidup dalam lingkungan institusi keagamaan yang kuat dengan resistensi dari institusi tersebut masih kuat. Resistensi tersebut menyebabkan kalangan liberal tidak secara tegas menyatakan pemikiran progresif, dan mereka cenderung bergabung dengan gerakan kemerdekaan atau nasionalisme melawan kolonialisme. Fenomena berbeda terlihat dari generasi kontemporer yang sebagian besar merupakan hasil pendidikan barat yang berasal dari universitas atau institusi pendidikan sekuler di Barat. Mereka bisa secara tegas menunjukkan gagasan politik kontemporer. Kemunculan Arkoun turut memperkuat basis intelektual kalangan liberal yang berada dalam berbagai

---

<sup>6</sup>Kurzman, Charles (Ed), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Politik Kontemporer tentang Isu-Isu Global*. Penerjemah: Bahrul Ulum dan Heri Junaedi. Jakarta: Paramadina, 2001, hal. xviii s.d hal xxii

<sup>7</sup>Ibid, hal. xxiv s.d. hal. xxv.

universitas terkemuka di dunia dan mendorong kemunculan pusat studi Islam liberal di berbagai negara<sup>8</sup> .

Kurzman menyebutkan bahwa generasi Islam liberal kontemporer lebih progresif dalam memahami relasi Islam dengan ide liberalisme dengan penekanan tiga paradigma syariah. Pertama, syariah bersifat liberal sebab syariah memberikan penghormatan terhadap kebebasan berpikir dalam proses ijtihadi, pengaturan hak kewarganegaraan yang setara antara muslim dan non muslim, dan sebagainya. Syariah liberal berperan untuk membuktikan bahwa gagasan liberalis tidak harus meminggirkan agama sebab Islam justru menegaskan prinsip kebebasan. Kedua, syariah yang diam memberikan peluang reinterpretasi atas doktrin agama, sehingga itu memungkinkan ada proses perluasan makna sesuai kebutuhan masyarakat. Doktrin syariah yang diam memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk membentuk pemerintahan secara bebas. Ketiga, syariah yang direinterpretasi ulang menempatkan interpretasi syariah sebagai proses yang dinamis dan itu bisa lebih mampu menunjukkan prinsip maqasid syariah secara substansif yang akan memperkuat basis pembentukan negara demokrasi.<sup>9</sup>

Kemudian, Kurzman melihat bahwa para pemikir Islam liberal kontemporer juga cenderung menyebarkan ide-ide progresif yang sama. Kalangan ini selalu mengutamakan prinsip negara demokrasi sebagai antitesis terhadap negara agama. Kalangan ini menyakini bahwa pelaksanaan teokrasi justru bertentangan dengan prinsip kebebasan politik dan kebebasan berpendapat, serta teokrasi juga beresiko mengabaikan hak-hak hidup dari kaum minoritas sesuai prinsip pluralisme. Kalangan liberal juga melihat demokrasi bisa mewujudkan maqasid syariah melalui keterbukaan interpretasi terhadap syariah sesuai dengan konteks modern. Interpretasi ulang menjadi penting terutama saat masyarakat Islam belum memberikan perlindungan hukum, sosial, dan politik bagi perempuan, padahal syariah sejak awal sudah memuat benih-benih pengakuan hak tersebut (Kurzman 2001, xliii-xlvi).

---

<sup>8</sup>Ibid, hal. xxvii s.d hal. xxxi.

<sup>9</sup>Ibid, hal. xxxii s.d. hal. xl

### **Pemikiran Islam Liberal dari Soekarno.**

Pemikiran Islam liberal di Indonesia mulai mengisi wacana pemikiran politik Islam di Indonesia sejak masa perlawanan politik terhadap kekuasaan kolonial di Hindia Barat. Perdebatan pemikiran berkaitan dengan pembentukan identitas nasional negara yang secara filosofis terbagi menjadi dua aliran besar, yaitu nasionalisme Islam yang berangkat dari pemikiran Natsir, Tjokroaminoto, dan sebagainya dan nasionalisme sekuler yang berusaha untuk memisahkan antara agama dan politik. Perdebatan antardua spektrum menjadi hal menarik sebab seorang tokoh nasionalis sekuler, yaitu Sukarno, justru merupakan murid dari pemikir Islam progresif, yaitu HOS Tjokroaminoto yang merupakan pendiri dari Sarekat Islam (SI).

Soekarno lahir di Kota Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Soekarno memasuki Hogere Burger School (HBS) di Surabaya pada tahun 1915. Pada Juli Soekarno lulus dari HBS dan meneruskan pendidikan tinggi di Technische Hoogeschool te Bandoeng (sekarang ITB) di Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Sipil tahun 1921. Soekarno membentuk Partai Nasional Indonesia pada tahun-tahun dia berkuliah. Aktivitas politik dia menyebabkan Soekarno berkali-kali menghadapi sanksi pemenjaraan oleh Belanda, mulai dari Sukamiskin hingga Ende. Soekarno terlibat aktif dalam pembahasan kemerdekaan Indonesia melalui Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dia bersama Muhammad Hatta menjadi pemimpin pertama Indonesia pada tahun 1945. Soekarno merupakan tokoh intelektual yang memiliki pemahaman mendalam mengenai filsafat dan Islam.<sup>10</sup>

Kemunculan ide nasionalisme sekuler sebenarnya menunjukkan adanya perubahan sosiokultural dari kelas elit dalam masyarakat nusantara pada masa tersebut. Perubahan tersebut terjadi dalam dua hal. Pertama, generasi baru dari kalangan elit hasil pendidikan Belanda memiliki tipologi yang berbeda dengan generasi lama. Sebagian generasi lama sekalipun juga hasil konstruksi pendidikan Belanda, namun

---

<sup>10</sup>Tribun Manado, Inilah Kisah Soekarno, Presiden Pertama RI, dari Perjalanan Hidup hingga Penghargaan Diraihnya, <http://manado.tribunnews.com/2018/06/21/inilah-kisah-soekarno-presiden-pertama-ri-dari-perjalanan-hidup-hingga-penghargaan-diraihnya>.

generasi lama justru menerima paradigma Islam dari Tjokroaminoto, dan mereka bersedia bergabung dengan SI. Sementara itu, generasi baru menerima gagasan sekulerisme dan menolak politisasi Islam dalam wujud SI. Kedua, tipologi masyarakat Islam baru yang berbeda dengan model lama mulai terbentuk. Model baru tersebut dikenal sebagai model Islam Abangan, yaitu model masyarakat Islam yang tidak memiliki ketaatan agama yang sama dengan model santri. Model santri lebih menerima gagasan Islam sebagai ideologi politik, dan hal ini berbeda dengan model kelas abangan.<sup>11</sup>

Kalangan nasionalis baru memunculkan resistensi dari penggiat Islam Politik sebab kalangan lama menilai generasi baru berusaha mewujudkan kembali dominasi peradaban Hindu dan Budha di Nusantara. Kritikan tersebut muncul sebagai respon terhadap argumentasi kalangan baru bahwa Nusantara pernah menjadi sebuah entitas geopolitik yang besar pada masa Kerajaan Majapahit. Poin penekanan sejarah Majapahit sebenarnya memiliki dua tujuan utama. Pertama, agama sebelum Islam juga menjadi fondasi kekuatan integrasi nusantara dalam satu simbol politik dan satu simbol hukum nasional. Penekanan pada unifikasi hukum dan politik yang melintasi batasan agama. Kedua, Kerajaan Majapahit juga sangat menekankan pada rasa kecintaan bangsa terhadap tanah air. Kecintaan terhadap tanah air menurut kalangan nasionalis seharusnya menjadi dasar dari perjuangan nasional melawan kolonisasi Belanda di Nusantara. Kalangan lama juga mengkhawatirkan bahwa ide nasionalisme hanya meniru ide dari masyarakat barat.

Sukarno pun memberikan kontra argumen. Sukarno berpandangan bahwa nasionalisme Indonesia berbeda dengan tradisi nasionalisme barat yang bersifat ekstrim. Nasionalisme ekstrim menurut Sukarno dicerminkan oleh fanatisme kebangsaan yang berlebihan dengan merendahkan bangsa-bangsa lain. Nasionalisme Indonesia justru berakar dari tradisi Timur, yang berkembang dari pemikiran Gandhi, Sun Yat Sen, dan sebagainya. Sukarno menekankan ide nasionalisme Timur yang menekankan semangat pembelaan terhadap kemanusiaan yang juga menentang

---

<sup>11</sup>Husnul Arifin Melayu, "Islam as an Ideology: The Political Thought of Tjokroaminoto." *Studi Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 9, No. 3, 2002, hal. 60.

kekerasan dan penindasan serta kolonialisme. Semangat itu semua mencerminkan keunikan nasionalisme Asia yang menolak semua bentuk penindasan oleh sesama bangsa di dunia. Nasionalisme Asia ingin menempatkan semua bangsa Asia setara dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia.

Nasionalisme Timur dari Sukarno perlu dihubungkan dengan dua tipologi nasionalisme. Hourani menjelaskan bahwa nasionalisme memiliki dua varian, yaitu nasionalisme teritorial dan nasionalisme kultural. Nasionalisme teritorial berkaitan erat dengan penggunaan simbol-simbol teritorial sebagai perwujudan kedaulatan suatu negara-bangsa. Nasionalisme model pertama cenderung menjadi ciri khas bangsa Barat yang sudah memiliki wilayah otonom dan memiliki struktur sosial yang lebih mapan. Sementara itu, nasionalisme kultural berakar pada keinginan bangsa-bangsa Timur untuk merumuskan simbol persatuan yang bisa menyatukan semua golongan dalam negara Timur. Simbol persatuan tersebut bisa didasari oleh nilai-nilai kultural, mulai dari lambang ras, etnis, hingga agama. Keberadaan simbol kultural bisa dipahami sebab nilai-nilai tradisional memang lebih dominan dalam masyarakat Timur.<sup>12</sup>

Pandangan Sukarno memang kemudian dikritisi oleh Tjokroaminoto. Tjokroaminoto melihat bahwa Islam sendiri merupakan simbol yang bisa melewati batasan-batasan geografis, bahasa, suka, dan ras. Islam menempatkan tauhid sebagai pemersatu masyarakat Islam yang ada di seluruh dunia, dan Islam secara egaliter akan menempatkan semua umat Islam dalam posisi setara tanpa melihat perbedaan status sosial, status ekonomi, dan status politik. Tjokroaminoto kemudian juga mempertanyakan gagasan dari nasionalisme sekuler mengenai kemungkinan-kemungkinan kebangkitan simbol identitas kedaerahan sebagai sumber nasionalisme tersebut. Tjokroaminoto sebenarnya mengkhawatirkan kemungkinan kebangkitan etnisitas yang justru akan merusak persatuan sesama bangsa Indonesia. Nasionalisme Islam akan mendorong rasa kecintaan kaum muslim terhadap tanah air dan umat Islam akan bekerja sama dengan umat lainnya (Melayu 2002, 61).

---

<sup>12</sup>Albert Hourani, Albert. "Near Eastern Nationalism Yesterday and Today. *Foreign Affairs*, Vol. 42, No.1, 1968, hal. 123-136.

Soekarno menyakini bahwa Islam bisa berkembang secara optimal bagi kesejahteraan umat Islam justru dengan ada pemisahan tegas antara masalah agama dengan masalah negara. Islam menurut Sukarno jika diserahkan kepada umat Islam, maka khazanah intelektual Islam akan berkembang tidak merefleksikan kepentingan politik negara. al-Qur'an dan Assunnah dalam keyakinan Sukarno sudah pasti benar, namun cara interpretasi terhadap Islam belum tentu benar selama interpretasi tersebut belum bebas dari tekanan kekuasaan. Sukarno tidak berarti menolak gagasan internalisasi moral Islam, namun dia menyakini bahwa itu harus melalui proses demokratisasi dalam parlemen dengan para wakil Islam berjuang untuk membangun konsensus politik yang menyebabkan semua putusan parlemen adalah bersifat Islam (Iskandar 2012).

Sisi liberal dari pemikiran Sukarno mengenai Islam dan politik terlihat dalam empat alasan dia mengenai keutamaan sistem sekuler. Pertama, Sukarno menyakini bahwa agama adalah urusan pribadi, sehingga persoalan agama diserahkan kepada masing-masing individual, dan negara tidak perlu terlibat dalam diskursus pemikiran politik Islam. Kedua, Sukarno menyakini bahwa tidak ada perintah mendirikan negara Islam. Teks al-Qur'an, Assunnah, dan ijma tidak ada satu pun yang mewajibkan umat Islam untuk membentuk negara Islam. Ketiga, pembentukan negara Islam bagi Sukarno bisa mengarah kepada penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik sesaat. Sukarno menyakini bahwa penguasa politik yang jahat dapat menggunakan penafsiran agama untuk menzalimi rakyat. Terakhir, Sukarno juga menyakini bahwa format sistem pemerintahan pada masa Nabi dan para sahabat belum tentu sesuai dengan kultur masyarakat modern yang berbeda dengan masyarakat Arabia pada masa kenabian Muhammad.<sup>13</sup>

Gagasan liberal Soekarno juga terlihat saat dia menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan harus tetap mendapatkan peluang untuk maju sebagaimana peluang dari kaum laki-laki, mulai dari dapat belajar secara layak,

---

<sup>13</sup> Muhammad Ainun Najib. "NU, SOEKARNO DAN STAAT ISLAM: WACANA NEGARA ISLAM DALAM BERITA NAHDLATOEL OELAMA (BNO)." *AHKAM*, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017, hal. 163 s.d. hal. 184.

mempunyai hak berpolitik, akses dalam bidang ekonomi dan urusan-urusan publik lainnya. Soekarno, menempatkan perempuan dalam kedudukan yang sama dengan laki-laki adalah penting, sebab hal ini merupakan cara yang paling adil bagi perempuan untuk memajukan diri. Kaum perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, maka mereka wajib memperoleh peluang untuk memperoleh akses yang adil.<sup>14</sup> Sukarno menolak pemahaman keagamaan yang menempatkan perempuan hanya sebatas dalam rumah, namun perempuan harus berpartisipasi dalam ranah publik. Sukarno juga menolak pemanfaatan doktrin keagamaan yang menghalangi ruang gerak perempuan, dan juga menolak simbol pembatas dalam ruangan gabungan antara lelaki dan perempuan yang menjadi simbol perbudakaan.

#### **4. Kesimpulan.**

Artikel ini menyimpulkan dua hal. Pertama, Islam liberal secara filosofis termasuk spektrum pemikiran Islam yang berusaha mempertemukan dua spektrum pemikiran, yaitu tradisional dan modernis. Islam liberal menggunakan perspektif modernis sebagai alat analisis yang mengedepankan metode liberalisasi atas teks yang terangkum dalam berbagai khazanah kitab klasik yang ada dalam peradaban Islam. Pendekatan komprehensif terhadap khazanah klasik meredakan konflik dengan Islam adat dan pendekatan liberalisasi teks membawa varian ini menjadi dekat dengan modernis. Islam liberal juga membangun metode berpikir yang berbeda dengan modernis dan adat. Islam liberal merujuk kitab-kitab klasik sebagai sumber awal dan memadukan itu dengan khazanah literatur filsafat Barat dengan tujuan menghasilkan diskursus ilmu yang berbeda dengan modernis dan adat.

Kedua, Islam liberal secara kontinue berupaya membangun jembatan yang mendekatkan antara Islam dengan demokrasi dan paham liberalisme. Upaya tersebut sebenarnya tidak terlepas dari kenyataan bahwa ada persepsi bahwa Islam tidak kompatibel dengan ide liberalisme, dan itu secara khusus memunculkan persepsi Islam tidak sejalan dengan ide sekulerisme. Hashemi dan Kurzman menyakini bahwa

---

<sup>14</sup>Sukma Umbara Tirta Firdaus." DEMOKRASI PENDIDIKAN ALA SOEKARNO DAN IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN ISLAM." *Al Ibrah*, Vol. 1, No. 1, 2016.

penggalian atas keseluruhan doktrin agama Islam dengan proses reinterpretasi terhadap bangunan struktur argumentasi dalam Islam, maka doktrin sekulerisme bisa menjadi sebuah prinsip politik yang justru bisa sejalan dengan Islam. Pemahaman yang sama mendorong Soekarno, Madjid, dan Wahid untuk menggali gagasan liberalisasi dalam Islam. Liberalisasi bagi mereka semua menjadi hal penting sebagai pembuktian bahwa Islam dan demokrasi memiliki titik temu secara filosofis, dan pembauran ide tersebut dapat menjelaskan alasan penting bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan Negara Pancasila.

Referensi:

Firdaus, Sukma Umbara Tirta. "DEMOKRASI PENDIDIKAN ALA SOEKARNO DAN IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN ISLAM. *Al Ibrah*, Vol.1, No. 1, 2016.

Hashemi, Nader. *Islam, Secularism, and Liberal Democracy Toward a Democratic Theory for Muslim Societies*. New York: Oxford University Press, 2009.

Hourani, Albert. "Near Eastern Nationalism Yesterday and Today." *Foreign Affairs*, Vol. 42, No. 1, 1968, hal. 23-136.

Iskandar, Rusli Kustiaman. POLEMIK DASAR NEGARA ISLAM ANTARA SOEKARNO DAN MOHAMMAD NATSIR. *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 19, No. 2, 2012, hal. 203-225.

Kurzman, Charles (Ed). *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Politik Kontemporer tentang Isu-Isu Global*. Penerjemah: Bahrul Ulum dan Heri Junaedi. Jakarta: Paramadina, 2003.

Melayu, Husnul Arifin. "Islam as an Ideology: The Political Thought of Tjokroaminoto." *Studi Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 9, No. 3, 2002.

Munawar-Rahman, Budi. *ISLAM DAN LIBERALISME*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2011.

Najib, Muhammad Ainun. "NU, SOEKARNO DAN STAAT ISLAM: WACANA NEGARA ISLAM DALAM BERITA NAHDLATOEL OELAMA (BNO)." *AHKAM*, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017, hal. 163-184.

Tribun Manado, Inilah Kisah Soekarno, Presiden Pertama RI, dari Perjalanan Hidup hingga Penghargaan Diraihnya, <http://manado.tribunnews.com/2018/06/21/inilah-kisah-soekarno-presiden-pertama-ri-dari-perjalanan-hidup-hingga-penghargaan-diraihnya>.